



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 900.1.3/31/2/2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan yang di danai dari dan/atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 28);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Diktum KESATU karena kedudukannya, merangkap tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas Bendahara sebagaimana tercantum dalam kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 Lampiran Keputusan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

1. Bendahara Penerima, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan;
  - b. mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD; dan
  - c. menatausahakan Anggaran SKPD secara tertib meliputi tugas-tugas menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan uang dalam pelaksanaan APBD;
2. Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas :
  - a. mencermati DPA-SKPD yang bersangkutan;
  - b. menyusun dan mengusulkan SPP-UP/GU/GU Nihil dan LS;
  - c. meneliti kelengkapan Dokumen pendukung;
  - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kwitansi dan dokumen pendukung yang didahului dengan proses menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD;
  - e. menguji ketersediaan dana dalam DPA-SKPD yang bersangkutan;
  - f. menyiapkan uang persediaan;
  - g. wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) apabila persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
  - h. membayar tunai Uang Persediaan; dan
  - i. membukukan SPM Uang Persediaan dan SPM-LS secara langsung.
3. Bendahara Pembantu, mempunyai tugas Membantu bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
4. Bendahara Gaji, mempunyai tugas mengurus gaji pegawai.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran terdiri atas Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KELIMA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK yang merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- KEENAM** : Pegawai ASN pada Diktum KEEMPAT merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KETUJUJUH** : Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan tugas kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KEDELAPAN** : Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan /atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- KESEMBILAN** : Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku setelah diangkat dan ditetapkan Pejabat Pengelola APBD pada SKPD Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

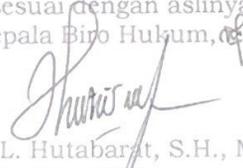
Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M  
Pembina TI/1  
NIP. 19660705 199201 2 022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 900.1.3/31/2/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
PAPUA BARAT  
TANGGAL 3 FEBRUARI 2023

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOJARAN	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU	PEMBANTU PERBUAT DAFTAR GAJI	PENGURUS BARANG	PENYIMPAN BARANG
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Papua Barat	EDUARD TOWANSIBA, SE NIP. 19760802 200412 1 001		EDI WILORO G. NIP. 19740514 200605 1 003	RONNY CHARLY MALISSA, A.Md NIP. 19800617 201104 1 001	
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Papua Barat	MAGDALENA MATELDA SAIPAKI NIP. 19650507 199003 2 010		KAROLINA BARANSANO, SE NIP. 19830201 202011 2 001	ITA AFRANI NIP. 19870401 200104 2 001	
3	Dinas Kesehatan (RSUD Provinsi Papua Barat)	Kepala RSUD Provinsi Papua Barat	MARICE ISIR, Amd,Gz NIP. 19890530 201522 2 001		ITALINDA SEPLE, SIP NIP. 19860121 201505 2 001	BERNARD KAFUEL MANING, S.Kep NIP. 19840121 200412 1 001	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Prov. Papua Barat	NAOMI KARAREHO, S.Sos NIP. 19811123 201004 2 001		RADDEN RISTON MOPU, A.Md NIP. 19880227 201412 1 002	JASMIN PARDOSI NIP. 19770722 200904 1 001	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Papua Barat	AMIDA LAMBU, SE NIP. 19870415 201412 2 001		GUNARI WURIATMO, S.IP NIP. 19730308 200502 1 004	ARDIANSAHI NIP. 19810203 200904 1 004	

6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Papua Barat	HILDA FRAWAR, SE NIP. 19781113 200412 2 001		RUSLIM SAIBANDAPA NIP. 19790801 201001 1 021	BERNADIS ULLO, SE NIP. 19830918 201412 1 001	
7	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Papua Barat	RONALD KAPLAR NIP. 19760419 201004 1 001		ISAK WARIKAR NIP. 19750307 200605 1 004	GABRIEL SEDIK, SH NIP. 19740930 200605 1 001	
8	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Prov. Papua Barat	LIDIJA MANGAR, SE NIP. 19770813 201004 2 001		MARGARETHA A. WABDARON, S Pd NIP. 19670315 200012 2 006	ABDUL RAH ALBAR NIP. 19760608 200412 1 001	
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Papua Barat	ALDON HURICH HENDRIK MAKOH NIP. 19850414 201001 1 030		JHON WARIKAR, SE NIP. 19830622 201412 1 003	DOLFINA HENNY BONAY NIP. 198001231 201004 2 001	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Papua Barat	NERGSI PEGI REFASI, SE NIP. 19841231 200701 2 004		HASBUILLAH NIP. 19810904 201004 2 001	ELJARKEM LAWANDI, AMD NIP. 19750722 201004 1 001	
11	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Papua Barat	RAODA, S Hut NIP. 19830116 201402 2 002		NAIMA DEMATUTU, S.ST NIP. 19830510 201412 2 001	MENSER WONGGOR, S.IP NIP. 19790608 201412 1 001	
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Papua Barat	FELEXSINA RUMPAISUM, SE NIP. 19880205 201412 2 001		INFIN SADIUPUL, V. RUMHEWAS NIP. 19951225 202011 2 001	MARGARETHA FIENNY T. JITMAU, ST NIP. 19890520 202011 2 001	
13	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Papua Barat	JECYBEL DYANA VERENT SULIA, S.STP NIP. 19970905 202008 2 002		DAIBIA KWARAS NIP. 19830314 201001 2 003	ROSSA MARGARETHA RUMPAE NIP. 19840512 201001 1 039	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Prov. Papua Barat	ELISABETH LIMBONG TOTASIK NIP. 19680620 200904 2 001		ABDUL KADIR, SE NIP. 19830718 201004 1 001	ENDAR EKA NOVRYANTI S STP NIP. 19901107 201206 2 002	

15	Dinas Perhubungan	Kepada Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat	KAROLINA NUSSOWY, A.Md NIP. 19830929 20104 2 001		SILVYA MAY, A.Md NIP. 19850915 201004 2 001	JUNUS HAUERSA NIP. 19870513 201004 1 002	
16	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Papua Barat	YETTI HATTI RUMPUHO NIP. 19791028 201001 2 025		DEYSIE PALIHANG, SE NIP. 19861220 201001 2 032	MELANESIA M. RUMERE NIP. 19596006 202011 2 001	
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov. Papua Barat	YULIANA FIANIE M. RUMERE, S.Pd NIP. 19770317 201004 2 001		DARNA, SH NIP. 19760716 201104 2 001	MONISA MINA RUMAWAK NIP. 19800705 201104 2 001	
18	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Papua Barat	HENDRY TOREY, A.Md NIP. 1901005 201412 1 001		AYU RAHMANIA NIP. 19820611 201004 2 001	OKY DWI PURWANANTO,SE NIP. 19901009 201004 1 001	
19	Dinas Kependidikan dan Olah Raga	Kepala Dinas Kependidikan dan Olah Raga Prov. Papua Barat	HILDA CHRISTINA SILIBUN NIP. 19900928 201004 2 001		MEINCE D. N. RUMBIAR NIP. 19820512 201004 2 001	YUSTHINA H. MEONBUN, A.Md, Sos NIP. 19770926 201004 1 001	
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Papua Barat	FRANSINCE MANDOWEN, A.Md,Par NIP. 1979022600909 2 002		RONALD MAMBRASAR, Aud,Par NIP. 19751026 201004 1 001	IRSDIANA, SE NIP. 19820524 201412 2 001	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Papua Barat	LILISA AYOAN, SE NIP. 19840313 201001 2 038		STEVANUS WONDWOGI NIP. 19770328 200701 1 007	PASKALINA BARU, A.Md, Sos NIP. 19790823 201004 2 001	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat	HUSEN RUMAUW, SH NIP. 197700406 200412 1 001		WAHYU SAPUTRI SANTOSO, S.Pi NIP. 19870414 201004 2 001	SUKRI TURUA, A.Md NIP. 19821227 201004 1 001	SEM ANTHON MATTUS MARIN, S.Pi NIP. 19830408 201104 1 001

23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Papua Barat	MELIANY O. SETIAWAN, SP., MP NIP. 19791005 201004 2 001		APOLINA S. MIRINO, A.Md NIP. 19840603 201412 2 001	DINA NOVITA HUSFAHARA, SE NIP. 19801108 200412 2 001	-
24	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Papua Barat	NANI SUKARNI KUBANGUN, S.Pi NIP. 19810415 201104 2 001		YELDRIK KATTOR, S.Pi, M.P NIP. 19850129 201412 1 001	ELAN LUSESTER ARONGGEAR, S.Pi NIP. 19910916 201412 2 001	-
25	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat	MAGDALENA RUMAROPEN, A.Md NIP. 19891028 201412 2 001		WILFRED YAKONIAS MENANTI NIP. 19860605 201505 1 001	DESSY F. WOISIRI, A.Md NIP. 19871216 201412 2 001	-
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Papua Barat	ENGDELINA AWARAWI, S.Kom NIP. 19850220 201412 2 001		HUSIN BASRI TAHAPARY NIP. 19810216 200904 1 002	FANI HANDAYANI, SP NIP. 19840220 201201 2 001	-
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Barat	SAWITI WANTO, S.Si NIP. 19840614 201104 2 001		GLORIA CHRISTIANIE NUSSY, SE NIP. 19900714 201104 2 001	SANTOSO YUSUF ANDERI NIP. 19810414 200904 1 007	-
28	Kepala Daerah	Kepala Daerah Papua Barat	IYONNE POLJHAUPPESSY, SE NIP. 19820411 201104 2 001				-
29	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	INDRAYANTI Y MANDACAN, S.E NIP. 19790102 200605 2 004		HENNI HAMELIA DJOPARI NIP. 19840928 200801 2 005	DWI HARTINI, A.Md NIP. 19820514 201104 2 001	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Prov. Papua Barat	LIDIYA E. I. WAMBRAUW, SE NIP. 19860107 201004 2 001			ANDRE MAYOR, S.STP NIP. 19930209 201609 1 001	-
31	Biro Hukum	Kepala Biro Hukum SETDA Prov. Papua Barat	STEVEN FAKDAWER, SH NIP. 19820918 201412 1 001			VEGI KRESNADI, S. STP NIP. 19980520 200208 1 001	-

32	Biro Kesjahteraan Rakyat	Kepala Biro Kesjahteraan Rakyat SETDA Prov. Papua Barat		SITI HAJAR HEREMBA, S.Sos NIP. 19850810 200312 2 002		MERRY SARONGALLO KAMARRU, SE NIP. 19800318 201004 2 001
33	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama SETDA Prov. Papua Barat		AWEKO WONGGOR KORWA NIP. 19910520 202011 1 001		VONNY SRINGSIH DOWANSIBA, SE NIP. 19860820 201412 2 001
34	Biro Organisasi	Kepala Biro Organisasi SETDA Prov. Papua Barat		MARYSITI RUMSAVOR, SE NIP. 19800811 201412 2 001		SEPTINUS MANDACAN, A.Md NIP. 19840820 201004 1 001
35	Biro Umum	Kepala Biro Umum SETDA Prov. Papua Barat		JUNIARTI SJIUKUR, ST NIP. 19750431 200412 2 001		ALFRED FRIETS TULASEKET, A.Md NIP. 19800215 200909 1 001
36	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa SETDA Prov. Papua Barat		STEVEN NIS GEORGE KAPISSA, A.Md NIP. 19830926 202011 1 001		ARMANDO RILON IDORWAY NIP. 19910606 202011 1 001
37	Biro Administrasi Penerimaan	Kepala Biro Administrasi Penerimaan SETDA Prov. Papua Barat		MARIA LAURINA AURI NIP. 19850110 201004 2 001		MUHAMMAD WAHYUDI, SE NIP. 19800601 201412 1 001
38	Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Biro Administrasi Pembangunan SETDA Prov. Papua Barat		MARLUS RICHARD DIMARA NIP. 19660322 200904 1 001		HERMAN ANDEI HEIPON NIP. 19840505 202011 1 001
39	Biro Administrasi Pelaksanaan Otas	Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otas SETDA Prov. Papua Barat		DONNI R. WOOF, S.JP NIP. 19840101 200312 4 017		ELISABETH ISR, S.P NIP. 19980721 201412 2 002
40	Sekretariat DPRD	Kepala Sekretariat DPRD Prov. Papua Barat		MARKIA E. TALISMAN NIP. 19820225 201104 2 001		YOHANES PATI GOLO NIP. 19690320 200801 1 001
41	Badan Penghubung Daerah	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov. Papua Barat		HEKTIUS RUMSAVOR NIP. 19821204 201104 1 001		YUNITA M. I. TOKAN, SE NIP. 19850611 201004 2 001

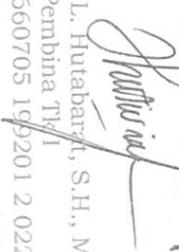
42	Sekretariat MRPII	Kepala Sekretariat MRPB Prov. Papua Barat	LIKHUS WANGGAL, SP NIP. 19880211 201412 1 001				
43	Inspektoria Daerah Provinsi	Kepala Inspektoria Daerah Provinsi Papua Barat	IRVANI ADELINA, SP, MP NIP. 19810119 201104 2 001		VALENTINO EVERHARD MANUSIWA, SE NIP. 19850316 202011 1 001	ERFIN PASOLOKAN NIP. 19850322 201007 2 001	
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Papua Barat	MERCVANA DESI, SE NIP. 19741219 200010 2 003		TIRSA LIDIA WANMA, SE NIP. 19860514 201412 2 001	PRIGILA LITASARI SROYER, S.STP NIP. 19900701 201010 2 001	
45	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Papua Barat	CORNELIA SWAHRA, SE NIP. 19850130 201412 2 001		RATNA SARI, A.Md NIP. 19831102 201412 2 001	MARIANA T. SIMATUPANG, A.Md NIP. 19810519 201004 2 001	
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat	NELCE A. SAMBERI, S.An NIP. 19831104 200412 2 002		FEBRILIAN MAWRAMPANEL NIP. 19891104 201104 2 001	ORTISAN L. KAPTARAUW, A.Md NIP. 19800519 200801 1 017	SEPTERIANUS YOMAKLISH NIP. 19830922 201101 1 003
47	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua Barat	DENNAWATI, SE NIP. 19771208 200801 2 018		ALBERTHINA RUMBAWER, A.Md.Sos NIP. 19791119 201104 2 001	LEOLUIS BUDIARSO NIP. 19760806 201104 1 001	
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Prov. Papua Barat	SONYA M. PATTY, SE, M.AP NIP. 19870904 200605 2 001		MEIRAN RATNASARI, SE NIP. 19800531 201004 2 001	HAYU AGRISTY RENMAUR, S.STP NIP. 199808 202008 1 001	
49	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Papua Barat	EMALIA AGUSTINA TALAUJUN, S.Hut NIP. 19850911 201004 2 001		ALFREDO R.C. KUBUAN, S.STP NIP. 19921021 201609 1 003		

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660705 199201 2 022